

**UPAYA POLRES BANYUASIN DALAM PELAYANAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN YANG AKUNTABEL
DAN TRANSPARAN BERDASARKAN PERKAP POLRI
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEWA AYU M. MAYANI
011900290**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEWA AYU M. MAYANI
NIM : 011900290
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA POLRES BANYUASIN DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN BERDASARKAN PERKAP POLRI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL

Dr. Derry Angling Kesuma, SH,M.Hum

Judul Skripsi : **UPAYA POLRES BANYUASIN DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN BERDASARKAN PERKAP POLRI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**

Penulis Skripsi : **Pembimbing Pertama**
Dewa Ayu M Mayani Dr.H.Firman Freaddy Busroh, SH, M.Hum,CTL
Pembimbing Kedua
Dr. Derry Angling Kesuma, SH, M.Hum

A B S T R A K

Upaya Polres Banyuasin Dalam Menjalankan Perannya Memberikan Pelayanan SKCK yang Akuntabel dan Transparan yaitu 1) Memberi pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKCK, 2) Melayani dengan baik tanpa perbedaan perlakuan antara masyarakat awam dengan masyarakat yang strata sosial tinggi, 3) Mengupayakan Pelayanan penerbitan SKCK dalam jangka waktu yang tidak lama, 4) Menetapkan biaya administrasi dalam penerbitan SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak sudah transparan tanpa adanya tambahan dan 5). Mengatur kerja sama dengan Kejaksaan dan pengadilan Banyuasin.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Banyuasin dalam pelayanan penerbitan SKCK yaitu Ketika ada orang tua yang datang untuk menerbitkan SKCK namun kurang paham mengenai pengisian formulir atau data SKCK, maka perlu adanya bantuan petugas untuk pengisian data tersebut, kemudian kendala yang dirasakan pemohon SKCK yaitu Dari persoalan waktu yaitu lamanya menunggu pelayanan SKCK dari pihak kepolisian yang bersangkutan dalam proses pengambilan SKCK, Karena, adanya perbedaan perlakuan beberapa dari pihak polisi dalam pengambilan SKCK pada sistem kekeluargaan yaitu lebih mengutamakan keluarganya meskipun datang lebih lambat dibanding pemohon yang lainnya dan dalam proses pengambilan SKCK tidak menyediakan nomor antrian kepada pemohon pembuatan SKCK, seharusnya pihak polisi atau petugas menerapkan pelayanan dalam sistem online.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	16
B. Penegakan Hukum	18
C. Pengertian dan Fungsi SKCK	22
D. Pelayanan SKCK	23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya Polres Banyuasin Dalam Menjalankan Perannya Memberikan Pelayanan SKCK yang Akuntabel dan Transparan yaitu 1) Memberi pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKCK, 2) Melayani dengan baik tanpa perbedaan perlakuan antara masyarakat awam dengan masyarakat yang strata sosial tinggi, 3) Mengupayakan Pelayanan penerbitan SKCK dalam jangka waktu yang tidak lama, 4) Menetapkan biaya administrasi dalam penerbitan SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak sudah transparan tanpa adanya tambahan dan 5). Mengatur kerja sama dengan Kejaksaan dan pengadilan Banyuasin.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Banyuasin dalam pelayanan penerbitan SKCK yaitu Ketika ada orang tua yang datang untuk menerbitkan SKCK namun kurang paham mengenai pengisian formulir atau data SKCK, maka perlu adanya bantuan petugas untuk pengisian data tersebut, kemudian kendala yang dirasakan pemohon SKCK yaitu Dari persoalan waktu yaitu lamanya menunggu pelayanan SKCK dari pihak kepolisian yang bersangkutan dalam proses

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah, R. *Penegak Hukum Dilapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri. 1997.

Arikunto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Barata Adya Atep. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta Elex MediaKompetindo. 2003.

Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Emzir, Metode. *Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: RajawaliPers.2010.

Hasibuan Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Aksara.2005.

Hayat. *manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Rawali Pers. 2016.

HR,Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007.

Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum*. jakarta : Bumi Aksar. 2006.

Muhtaj El Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2015.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.2002.